

ABSTRAK

Didalam UU Drrt. No. 12 Tahun 1951, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan dalam peruntukannya. Dalam prakteknya, tidak jarang seseorang yang membawa senjata tajam yang memang untuk digunakan hal-hak yang tidak bertentangan dengan hukum dianggap melakukan tindak pidana. Hal ini tentunya sangat mengawatirkan, dimana sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang adanya aturan dalam membawa senjata tajam. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Ratio Legis Pasal 2 UU Drrt. No. 12 Thn. 1951 dan Ratio Decidendi putusan hakim terkait tindak pidana membawa senjata tajam. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Ratio legis daridikeluarkannya Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan senjata tajam pada waktu itu. Juga sebagai regulasi yang mengatur tentang penggunaan senjata tajam mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Didalam kedua putusan yang dianalisis penulis, hakim secara langsung memfonis terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dengan dasar terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tanpa sama sekali mempertimbangkan untuk apa sebenarnya para terdakwa membawa senjata tajam.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Senjata Tajam

ABSTRACT

In the Act UU Drrt. No. 12 In 1951, a person carrying a sharp weapon could be categorized as a form of criminal act if it was not used in its designation. In practice, it is not uncommon for someone carrying a sharp weapon to use rights that are not in conflict with the law is considered a crime. The problems in this thesis are: Legis Ratio Article 2 of the Law Drrt. No. 12 yr. 1951 and Ratio Decidendi the judge's decision related to the crime of carrying a sharp weapon. The type of research used in this thesis is juridical normative (legal research), using a statutory approach, a conceptual approach.

The legis ratio from the issuance of Article 2 of the Emergency Law Number 12 of 1951 is to avoid the adverse effects of the use of sharp weapons at that time. Also as a regulation governing the use of sharp weapons which are allowed and which are not allowed. In the two decisions analyzed by the author, the judge immediately convicted the defendant of committing acts of carrying a sharp weapon without rights on the basis of fulfilling the elements of Article 2 of the Emergency Law Number 12 of 1951 and convicting the defendants without at all considering what exactly the defendants carrying sharp weapons.

Keywords: Criminal Acts, Sharp Weapons

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 94 /Pid.Sus/2013/PN.Smp.
2. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor. 244/Pid.Sus/2019/PN.Krs.